

RENTA

TAHUN 2022



Kecamatan Amali

Adalah Wilayah
Penghasil Jagung
Terbesar di Kabupaten
Bone



 Halo.bone

KABUPATEN BONE

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Amali dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Amali, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan, sekian dan terimakasih.

Taretta, Desember 2021



CAMAT AMALI

[Handwritten Signature]
Drs. A. MALLANTI, M. Si
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19661025 198603 1 006

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------|
| KATA PENGANTAR | <i>i</i> |
| DAFTAR ISI | <i>ii</i> |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA | |
| KECAMATAN TAHUN LALU | 8 |
| 2.1 Evaluasi renja kecamatan tahun lalu dan capaian renstra | 8 |
| 2.2 Analisa kinerja pelayanan kecamatan | 15 |
| 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan | 20 |
| 2.4 Rivew rancangan awal RKPD | 21 |
| 2.5 Penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat | 27 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 28 |
| 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional | 28 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan | 29 |
| 3.3 Program dan kegiatan | 30 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN..... | 32 |
| BAB V PENUTUP | 36 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam upaya melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Amali secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, maka perlu adanya Rencana Kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Amali membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program – program pembangunan, kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Renja Kecamatan Amali tahun 2022 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Renja Kecamatan Amali menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Bone ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, provinsi dan pusat.

Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh

tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Renja Kecamatan Amali juga memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Amali, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan. Kecamatan Amali Kabupaten Bone menyusun Renja Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- ♦ Renja Kecamatan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Kecamatan yang ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- ♦ Renja merupakan acuan Kecamatan untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022;
- ♦ Renja Kecamatan merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Kecamatan, orientasi mengenai RKPD dan Renja Kecamatan, penyusunan agenda kerja, serta menyiapkan data dan informasi.

Penyusunan Renja Kecamatan merupakan tahapan penyempurnaan dokumen rancangan Renja menjadi dokumen Renja Kecamatan yang difinitif, antara lain :

- Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2022;

- Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Bone Tahun 2022;
- Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2022.

Sebagai sebuah dokumen resmi kecamatan, Renja Kecamatan Amali mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan tahunan kecamatan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang Responsif, Integratif dan akuntabel, Kecamatan Amali Kabupaten Bone dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Amali dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 81). Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

13. Surat Edaran Bupati Bone Nomor : 050/99/III/BAPPEDA tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 3).
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- * Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Amali Tahun 2022 adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Amali pada Tahun 2022.
- * Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Amali Tahun 2022 adalah:
 1. Sebagai pedoman bagi aparat perencana Kecamatan Amali dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2022 selama (satu) tahun kedepan.
 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatatur Kecamatan Amali dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dan untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Kecamatan, proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan, keterkaitan antara Rencana Kerja Kecamatan dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan, dengan Rencana Kerja K/L dan

Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan.

1.3. Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun lalu

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Tahun Lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3 Isu – isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

Rencana kerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja, Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Amali Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Amali Tahun 2022 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) dan melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya, untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan Renja Tahun 2018 dan APBD Kabupaten Bone dan dijabarkan ke dalam tabel T.C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN S/D TAHUN 2021 BERDASARKAN PMDN-90
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE

Nama Kecamatan : KECAMATAN AMALI

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2018-2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 20..) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d Tahun berjalan | |
|----------|--|---|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja Kecamatan Tahun 2021 | Realisasi Renja Kecamatan Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8=(7/6)</i> | <i>9</i> | <i>10=(5+7+9)</i> | <i>11=(10/4)</i> |
| 7 | URUSAN KEWILAYAN | | | | | | | | | |
| 7 | KECAMATAN | | | | | | | | | |
| 7 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | | | | | | | | |
| 7 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kinerja serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | | | | | | | | |
| 7 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen) | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 70% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|---|--|-----|---|---|---|------|---|---|-----|
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen) | 7 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 70% |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen) | 6 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 70% |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen) | 6 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 70% |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti Diklapim/Diklat Administrator (orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia sesuai rencana kebutuhan | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN | 100 | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 75% |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia sesuai rencana kebutuhan | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket) | 100 | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 75% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|--|--|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (paket) | 100 | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 70% |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan (paket) | 100 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 70% |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali) | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan) | 686 | 240 | 240 | 240 | 100% | 240 | 360 | 55% |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebel (mebel) | 12 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 9 | 60% |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit) | 25 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 16 | 60% |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Listrik, Telpn/Wifi dan Air (rekening) | 120 | 24 | 24 | 24 | 100% | 24 | 96 | 60% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|--|--|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selamasetahun (orang) | 360 | 120 | 120 | 120 | 84% | 120 | 310 | 70% |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit) | 120 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 25 | 70% |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan) | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 70% |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (paket) | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 70% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|---|---|-----|----|----|----|------|----|-----|-----|--|--|--|
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen) | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 70% | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket) | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 60% | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan (dokumen) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 65% | | | |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%) | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Operasional Tripika (kali) | 180 | 96 | 36 | 36 | 100% | 36 | 144 | 93% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|---|--|----|----|----|----|------|----|----|-----|
| 7 | 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa (%) | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.02 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB) (laporan) | 70 | 14 | 14 | 14 | 100% | 14 | 56 | 70% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Amali dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yakni :

- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
- Meningkatnya Disiplin Sumber daya Aparatur
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Peningkatan serta pemutakhiran sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2022 yang tercermin pada pelaksanaan program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
 - Struktur organisasi Kantor Camat Amali Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
 - Situasi Kantor yang kondusif sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar aparatur yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (Team Work).
 - Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan penerapan kebijakan Bupati
 - Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi sehingga memudahkan komunikasi dengan instansi terkait.
 - Sarana dan prasarana kerja di kantor Camat meskipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas namun sangat membantu aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - Hubungan kerja yang baik dan dinamis dengan organisasi perangkat daerah terkait.
2. Adapun kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja adalah :

- Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Kurangnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Amali terutama pada jajaran staf.
- Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- Masih adanya Aparatur Sipil Negara yang belum bisa mengoperasikan perangkat komputer.
- Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Amali yang dijabarkan kedalam tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN AMALI BERDASARKAN PMDN 90
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------|----------|------|---------------------|
| | | | | Tahun 2020/K | Tahun 2021/K | Tahun 2022/K | Tahun 2023/K | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen) | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen) | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan bulanan bagi ASN (Laporan) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 7 | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (paket) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan (paket) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali) | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 10 | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan) | | | 240 | 252 | 240 | 276 | 240 | 252 | 240 | 276 | |
| 11 | Jumlah Pengadaan Mebel (paket) | | | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 12 | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit) | | | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| 13 | Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening) | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 14 | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang) | | | 72 | 120 | 120 | 72 | 72 | 120 | 120 | 72 | |
| 15 | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (kegiatan) | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 17 | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (paket) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen) | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 19 | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan (dokumen) | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (kali) | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 22 | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB) (laporan) | | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |

2.3 Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Kecamatan Amali sebagai pelaksana pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

Isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Amali dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- 2) Pelayanan Prima. Kecamatan Amali sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan Prima, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
- 3) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Arah kebijakan pemerintah Kabupaten Bone, tentang pengembangan bidang Pariwisata. Sebagai wilayah yang memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Amali harus betul-betul memanfaatkan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan, Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rancangan awal rencana kerja Tahun 2022. Tabel T-C.31 berikut.:

Tabel T-C.31.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2021 BERDASARKAN PMDN-90

| No | Rancangan Awal RKPd | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | |
|--|--|------------|---|------------------------|---------------------|--|------------|---|------------------------|---------------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Amali | Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen) | 2 dokumen | 18,500,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Amali | Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen) | 2 dokumen | 18,500,000 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec. Amali | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen) | 1 dokumen | 1,700,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Amali | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen) | 1 dokumen | 1,700,000 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Amali | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen) | 1 dokumen | 1,742,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Amali | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen) | 1 dokumen | 1,742,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--------------|--|--|------------|--|--------------|------------|
| 4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Amali | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen) | 1 dokumen | 1,520,000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Amali | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen) | 1 dokumen | 1,520,000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | |
| 5 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Amali | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket) | 1 paket | 15,909,000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Amali | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket) | 1 paket | 15,909,000 |
| 6 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Amali | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (paket) | 1 paket | 93,780,000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Amali | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (paket) | 1 paket | 93,780,000 |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Amali | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan (paket) | 1 paket | 10,480,000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Amali | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan (paket) | 1 paket | 10,480,000 |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec. Amali | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali) | 12 kali | 1,200,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec. Amali | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali) | 12 kali | 1,200,000 |
| 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Amali | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan) | 240 kegiatan | 36,000,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Amali | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan) | 240 kegiatan | 36,000,000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| 10 | Pengadaan Mebel | Kec. Amali | Jumlah Pengadaan Mebel (paket) | 6 paket | 25,543,000 | Pengadaan Mebel | Kec. Amali | Jumlah Pengadaan Mebel (paket) | 6 paket | 25,543,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|-------------|-------------|--|------------|--|-------------|-------------|
| 11 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Amali | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit) | 3 unit | 12,190,000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Amali | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit) | 3 unit | 12,190,000 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 12 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik | Kec. Amali | Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening) | 24 Rekening | 8,838,200 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik | Kec. Amali | Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening) | 24 Rekening | 8,838,200 |
| 13 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum | Kec. Amali | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selamasetahun (orang) | 120 Orang | 144,766,400 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum | Kec. Amali | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selamasetahun (orang) | 120 Orang | 144,766,400 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 14 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Amali | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | 4 unit | 57,990,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Amali | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | 4 unit | 57,990,000 |
| 15 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Amali | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3 paket | 5.980,000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Amali | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3 paket | 5.980,000 |
| 16 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Amali | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (kegiatan) | 12 kegiatan | 5,699,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Amali | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (kegiatan) | 12 kegiatan | 5,699,000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | |
| 17 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Amali | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (paket) | 1 paket | 14,155,000 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Amali | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (paket) | 1 paket | 14,544,200 |

| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) | | | |
|---|---|------------|--|-----------|-------------|---|---------------|---|-----------|-------------|--|
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | |
| 18 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | Kec. Amali | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen) | 2 dokumen | 15.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | Kec. Amali | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen) | 2 dokumen | 15.000.000 | |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | KegiatanPemberdayaan Kelurahan | | | | | |
| 19 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kec. Amali | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket) | 1 paket | 232,603,000 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kec. Amali | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket) | 1 paket | 232,603,000 | |
| 20 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kec. Amali | Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan (dokumen) | 1 paket | 29,897,000 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kec. Amali | Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan (dokumen) | 1 paket | 29,897,000 | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | |
| Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%) | | | | | | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%) | | | | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | |
| 21 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Amali | Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (kali) | 36 kali | 27,000,000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Amali | Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (kali) | 36 kali | 27,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%) | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%) | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan Kecamatan Amali pada tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan Peningkatan kualitas aparatur.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa.
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak retribusi.
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Tripika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada diwilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Amali maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone sesuai tema Tahun 2022 adalah “**Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**”.

Adapun Prioritas Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone terkait dengan prioritas pembanguna Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini :

| No | Nasional | Sulawesi Selatan | Kabupaten Bone |
|----|--|--|--|
| 1 | Rancangan Teknokratik RPJMN 2022 - 2024 | Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan public yang berkualitas |
| 2 | | Penguatan infrastruktur wilayah | Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat |
| 3 | | Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan | Peningkatan pelayanan Pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya |
| 4 | | Penurunan kesenjangan sosial ekonomi | Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan Kawasan perdesaan |
| 5 | | Pembangunan Manusia | Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik |
| 6 | | Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas | Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha |
| 7 | | Pelestarian lingkungan hidup | Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat |

Tabel diatas menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi dengan arah kebijakan dan program Kabupaten Bone.

Peran Kecamatan Amali sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan – kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Amali adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat se- Kecamatan Amali baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang taruna, LPMD, dsb), serta koordinator pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
2. Mengoptimalkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Bone yang adil dan Sejahtera.
4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022 adalah implementasi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
2. Menciptakan keamanan dan dan ketertiban masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemeratan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan..
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Sasaran Renja Kecamatan Kecamatan Amali Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
- b. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

3.3 Program Dan Kegiatan

Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Amali adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone,
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri atas :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri atas:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Umum dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, sub kegiatan :
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
 - 1.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

Rencana Kerja Kecamatan Amali Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2022 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif). Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksanaan dari program perangkat daerah Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini (Tabel C.33)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|-----------------|-----------------------|--|--|---|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Media | 100 Persen | 1,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 1,320,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat | Persentase Aparat yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan | Kab. Bone, Amali, | 100 Persen | 1 Orang | 100 Persen | 40,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Aparat yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan | 1 Orang | 40,000,000 | | |
| | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | | |
| Kode | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 100 Persen | 240 Kegiatan | 100 Persen | 36,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 39,600,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 37,733,000 | | | | | | 41,506,300 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Pengadaan Meubeleur | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 100 Persen | 6 Paket | 100 Persen | 25,543,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 28,097,300 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 100 Persen | 3 Unit | 100 Persen | 12,190,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 13,409,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 153,149,600 | | | | | | | 168,464,560 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Rekening Pembayaran Air dan Listrik Sesuai Rencana Kebutuhan | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 100 Persen | 24 Rekening | 100 Persen | 8,383,200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 9,221,520 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 100 Persen | 120 Orang | 100 Persen | 144,766,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 159,243,040 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 69,669,000 | | | | | | | 76,635,900 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 100 Persen | 4 Unit | 100 Persen | 57,990,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 63,789,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 100 Persen | 3 paket | 100 Persen | 5,980,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 6,578,000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------------------------|------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------|--|----------------------|-------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Kegiatan | 100 Persen | 5,699,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 6,268,900 | | | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | 14,155,000 | | | | | | | 0 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | 14,155,000 | | | | | | | | 0 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 96.85 Persen | 1 Paket | 100 Persen | 14,155,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana | 96.85 Persen | 0 | | | |
| | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | | |
| Kode | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | 277,500,000 | | | | | | | 305,250,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | 15,000,000 | | | | | | | | 16,500,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen FKKS yang tersusun | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 97 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 97 Persen | 16,500,000 | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | 262,500,000 | | | | | | | 288,750,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 97 Persen | 2 Paket | 100 Persen | 232,603,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 97 Persen | 247,837,700 | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Mampotu | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 97 Persen | 1 Kegiatan | 100 Persen | 29,897,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 97 Persen | 40,912,300 | | | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | 27,000,000 | | | | | | | 29,700,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | 27,000,000 | | | | | | | 29,700,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Bulan | 100 Persen | 27,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 Persen | 29,700,000 | | | |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | 18,000,000 | | | | | | | 19,800,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | 18,000,000 | | | | | | | 19,800,000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB) | Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Bone, Amali, Semua Kelurahan | 100 Persen | 14 Laporan | 100 Persen | 18,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 Persen | 19,800,000 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 9,061,358,414 | | | | | | 9,926,115,115 | |

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Kecamatan Amali merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja, Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Amali Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan.

Keberhasilan suatu program kegiatan, sangat ditentukan oleh perencanaan, tanpa sebuah perencanaan yang baik tidak mungkin tugas yang sudah ditetapkan akan tercapai dengan optimal. Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Amali disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2022. Rencana Kerja Kecamatan Amali yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan, kepala seksi dan seluruh staf Kecamatan Amali demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

Rencana Kerja Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2022, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi Perencana dan Pengambil Kebijakan di lingkungan Kecamatan Amali Kabupaten Bone dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Akhirnya, kami harapkan adanya dukungan dari semua pihak untuk mencapai tujuan Kecamatan Amali yang berintegritas dan professional.